**BAB III**

**ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPKAD PROVINSI JAWA BARAT**

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menghadapi beberapa isu-isu strategis yang harus di antisipasi. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BPKAD alam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tupoksi BPKAD, namun kami berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan yang kami berikan. Beberapa kriteria yang kami kembangkan dalam menentukan isu-isu yang ada menjadi isu strategis meliputi:

1. Pengarunya terhadap Visi Jawa Barat;
2. Merupakan Tupoksi organisasi;
3. Memiliki dampak terhadap pelayanan publik;
4. Memiliki dampak terhadap laporan keuangan (Opini BPK);
5. Memiliki dampak terhadap pembangunan;
6. Tingkat kesulitan untuk di antisipasi;
7. Janji Politik.

Untuk itu berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**
   1. Identifikasi Internal

Terdapat beberapa permasalahan internal yang dikelompokan sebagai permasalahan yang memiliki dampak terhadap tupoksi organisasi antara lain:

* + 1. Sarana prasarana yang belum memadai;
    2. Pengembangan dan pemanfaatan ATISISBADA dan SIPKD disetiap OPD belum optimal;
    3. Belum memakainya SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil OPD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan BMD;
    4. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel;
    5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
    6. Masih adanya aset di BPKAD yang belum dioptimalkan;
    7. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan asset;
    8. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas;
    9. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;
    10. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah;
  1. Identifikasi eksternal

Selain permasalahan diatas, terdapat beberapa permasalahan eksternal (tantangan) yang dikelompokan sebagai permasalahan yang memiliki dampak terhadap tupoksi organisasi antara lain:

* + 1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di OPD;
    2. Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;
    3. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatya jumlah paket pengadaan barang dan jasa;
    4. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;
    5. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
    6. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai.

1. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan, sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”.

Dari misi Provinsi Jawa Barat diatas, kami turunkan menjadi visi BPKAD yaitu ”Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional Untuk Mendukung Terwujudnya Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.

Untuk menjabarkan visi Jawa Barat, maka disusunlah misi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental bagi visi suatu organisasi. agar visi dapat diwujudkan maka misi harus dinyatakan dengan jelas dan menunjuk pada apa yang harus dipenuhi dan dapat dicapai pada masa yang akan datang.

Misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2013-2018 yaitu :

MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.

Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, spirit juara dan siap berkompetisi.

MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.

Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.

Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.

Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga, Pengembangan Pariwisata dalam Kearifan Lokal.

Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Jawa Barat, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah misi ke tiga yaitu ”Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur dan Perluasan Partisipasi Publik” yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Misi ke-3 Provinsi Jawa Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Misi** | **Tujuan** | **Sasaran** |
| **Misi Ketiga,**  Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. | 1. Meningkatkan kualitas birokras yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif.  2. Terwujudnya pemerintahan yang modern  3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten  4. Meningkatkan stabilitas di daerah | 1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik  2. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK  3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur |

Untuk mendukung pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran diatas, BPKAD Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset berbasis IT;
2. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima;
3. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja (Activitie Base Costing);
4. Melakukan perencanaan pengadaan dan pemberdayaan aset;
5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD;
6. Pengaturan Pengelolaan Keuangan dan aset yang efisien, efektif dan akuntabel;
7. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif;
8. Meningkatkan Sarana, Prasarana dan kompetensi SDM Pengelola Keuangan dan aset yang profesional;
9. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
10. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
11. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi BPKAD/Biro dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari penjabaran misi diatas, terdapat indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018 yang berkaitan langsung dengan tupoksi BPKAD. Meliputi:

**Tabel 3.2**

**Indikator Kinerja Misi Ke-3 Provinsi Jawa Barat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik** | | | | |
|  | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **2017** | **2018** |
| 1. | Indikator Daya Saing Provinsi | Opini BPK | WTP | WTP |

Analisa indikator kinerja:

Terdapat beberapa capaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan langsung dengan kinerja BPKAD, yaitu indikator daya saing provinsi dengan satuan opini WTP atas LKPD Provinsi Jawa Barat. Indikator ini berkaitan dengan daya saing provinsi bila dibandingkan dengan Provinsi lain. Daya saing meliputi aspek tata kelola organisasi. Salah satu wujud tata kelola organisasi yang baik adalah pengelolaan keuangan tang akuntabel. Salah satu bentuk pengelolan keuangan yang akuntabel adalah dengan mendapatkan opini WTP dari BPK.

**3.3. Telaahan Renstra K/L**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah :

“***Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa***”

Dengan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public.

Dari kelima misi diatas, yang berkaitan dengan BPKAD adalah misi nomor lima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan public dengan sasaran yang lebih spesifik yaitu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Berikut adalah tabel keterkaitan sasaran Permasalahan Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra K/L sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya :

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi Berdasarkan Sasaran Renstra**

**Kementrian Dalam Negeri, SKPD Kota, BPKAD**

**Sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L  (Kementrian Dalam Negeri) | | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L  (Kota Bandung) | Permasalahan Pelayanan BPKAD Provinsi | Sebagai Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
|  | * “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif | * Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kualitas Raperda APBD * Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah * Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan | * Kuantitas SDM yang belum memenuhi standar; * Belum ada SOP dan SPM pelayanan; * Belum ada SOP dan SPM penatausahaan keuangan daerah; * Kebutuhan akan pengadaan BMD yang besar; * Sistem informasi yang belum terintegrasi; * Kualitas SDM yang belum merata di seluruh OPD; * Sistem penganggaran yang belum terpadu; * Tuntutan masyarakan akan transparasi LKPD; * Perubahan sistem dan standar pelaporan; * Dukungan Kepala Daerah atas pembangunan Sistem Informasi Akuntansi yang memadai. * Jumlah anggaran yang meningkat. * Meningkatnya jumlah aset daerah | V  V  V  V  V  V | V  V  V  V  V  V |
|  |  |  |

**3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis**

Koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar ruang antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota merupakan kunci penyelenggaraan tata ruang yang baik. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Barat yang baik ditandai dengan terbentuknya sistem kota – kota yang dilakukan dengan pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional (PKN). Tata ruang ruang terkait dengan lingkungan hidup. Setiap rencana tata ruang harus memberikan dampak yang ramah lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya. Diharapkan tahapan tersebut akan mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam melakukan penataan ruang daerah, Provinsi Jawa Barat menghadapi permasalahan eksternal seperti arus urbanisasi dan isu *global warming* (permasalahan eksternal), dan permasalahan internal seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang berpengaruh kepada peningkatan semakin tingginya kebutuhan akan sumberdaya lahan, air, energi, ketahanan pangan, kesempatan kerja, dan sebagainya.

Terdapat tiga kebijakan pengaturan ruang yang kedepan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Pembangunan dan pengendalian infrastruktur wilayah provinsi;
2. Melakukan pengembangan kawasan;
3. Pembatasan intensitas pemanfaaan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas maka BPKAD Provinsi Jawa Barat menata aset yang dikelolanya sesuai dengan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Selain itu, BPKAD juga harus mempersiapkan pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 3.4**

**Permasalahan Pelayanan BPKAD Provinsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

**Sebagai Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BPKAD | | Permasalahan Pelayanan BPKAD | Sebagai Faktor | |
| Penghambat | Pendorong |
| - | Mempersiapkan perencanaan keuangan terkait dengan rencana pengembangan tata ruang dan infrastruktur Provinsi Jawa Barat | * Belum terintegrasinya konsep tata ruang dengan rencana anggaran keuangan * Kurangnya pemahaman SDM BPKAD mengenai konsep tataruang * Jumlah aset yang besar * Kebutuhan pengadaan BMD dalam jumlah besar | V  V | V  V |
| - | Optimalisasi aset dan melakukan pengadaan BMD yang sesuai dengan konsep tata ruang Provinsi Jawa Barat |

**3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis BPKAD**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain).

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi BPKAD Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan nasional.

Dalam menentukan isu strategis, kami menggunakan beberapa kriteria yang kami kembangkan sesuai dengan Tupoksi organisasi, yaitu :

**Tabel 3.5**

**Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kriteria** | **Bobot** |
| 1 | Pengaruh terhadap visi Jabar | 20 |
| 2 | Tupoksi Organisasi | 10 |
| 3 | Dampak terhadap Publik | 10 |
| 4 | Dampak terhadap Laporan Keuangan | 10 |
| 5 | Dampak terhadap Pembangunan | 15 |
| 6 | Kesulitan Untuk di tangani | 15 |
| 7 | Janji Politik | 20 |
|  | Jumlah | 100 |

**Tabel 3.6**

**Klasifikasi Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kriteria** | **Bobot** |
| 1 | Tidak Berpengaruh | 25 |
| 2 | Berpengaruh | 50 |
| 3 | Sangat Berpengaruh | 75 |

Setelah mengembangkan kriteria untuk menentukan permasalahan menjadi kategori strategis, kami melakukan identifikasi dan analisa masalah berdasarkan kriteria yang kami kembangkan diatas. Proses ini dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7**

**Klasifikasi Skor Isu-isu Strategis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Isu Strategis** | **Jumlah Skor** | **Rata-rata Skor** |
|  |  |
| 1 | belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; | 4.250 | 56,67 |
| 2 | penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM); | 4.375 | 58,33 |
| 3 | kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; | 6.500 | 86,67 |
| 4 | masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; | 6.875 | 91,67 |
| 5 | pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; | 4.875 | 65,00 |
| 6 | Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; | 5.625 | 75,00 |
| 7 | belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan Anggaran. | 4.000 | 53,33 |

Dari analisa diatas, isu kompetensi SDM yang tidak merata, tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan publik memiliki skor yang cukup besar. Hal ini berarti ketiga isu tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan tupoksi BPKAD. BPKAD harus menyusun strategi agar isu tersebut tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan BPKAD.

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada, perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 3.8**

**Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal**

PLI PLE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kekuatan (S)** | **No.** | **Peluang (O)** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Posisi organisasi baru yang lebih kuat dan independen  Kualitas SDM Internal organisasi  Komitmen pimpinan dan karyawan yang Tinggi  Organisasi di isi oleh SDM yang sudah berpengalaman  Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel  Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.  Sertifikasi keahlian aparatur | 1.  2.  3.  4. | Peran BPKAD yang strategis  Mudah berkoordinasi dengan pusat  Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan asset yang masih bisa dikembangkan  Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah  Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam  meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah. |
| **No.** | **Kelemahan (W)** | **No.** | **Tantangan (T)** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13. | Standarisasi beban kerja  Sarana prasarana yang sudah  tidak memadai  Pengembangan dan pemanfaatan ATISISBADA disetiap OPD belum optimal  SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil OPD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan BMD belum dimiliki  Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel  Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan  Masih adanya aset di BPKAD yang belum dioptimalkan  Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan asset  Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas  Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah  Belum tegasnya sanksi terhadap kelalaian dalam jual beli aset daerah  Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan asset  Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;  Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat  Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah  Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatya jumlah paket pengadaan barang dan jasa  Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance  Penerapan system akuntansi berbasis accrual  Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK  Fasilitas pengelola barang yang belum memadai  Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa  Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat |

Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang diperlukan untuk lebih efisien dan efektif. Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor ekternal (KAFE). Formulasi tersebut dituangkan dalam tabel analisa SWOT dibawah ini:

**Tabel 3.9**

**Matrik SWOT**

Matrik SWOT Dalam Rangka Menentukan Asumsi-asumsi Strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAFI**  **KAFE** | **Kekuatan (S):**   1. Posisi organisasi baru yang lebih kuat dan independen 2. Kualitas SDM Internal organisasi 3. Komitmen pimpinan dan karyawan yang Tinggi 4. Organisasi di isi oleh SDM yang sudah berpengalaman 5. Sistem informasipengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaanpenganggaran,penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 6. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah. 7. Sertifikasi keahlian aparatur. | **Kelemahan (W):**   1. Standarisasi beban kerja 2. Sarana prasarana yang sudah 3. tidak memadai 4. Pengembangan dan pemanfaatan ATISISBADA disetiap OPD belum optimal 5. SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil OPD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan BMD belum dimiliki 6. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel 7. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan 8. Masih adanya aset di BPKAD yang belum dioptimalkan 9. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan asset 10. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas 11. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah 12. Belum tegasnya sanksi terhadap kelalaian dalam jual beli aset daerah 13. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah |
| **Peluang (O)** | **Strategi (S-O)** | **Strategi (W-O)** |
| 1. Peran BPKAD yang strategis 2. Mudah berkoordinasi dengan pusat 3. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan asset yang masih bisa dikembangkan 4. Komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah 5. Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah | 1. Peningkatan Kompetensi BPKAD; 2. Peningkatan Eksistensi BPKAD; 3. Membentuk rencana penyelesaian permasalahan aset dan melibatkan kepala daerah; 4. Mengoptimalkan aset untuk meningkatkan pelayanan dan PAD; 5. Melakukan kordinasi secara rutin dengan Pusat dalam rangka menyelesaikan permasalahan aset; 6. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD. | 1. Menetapkan beban kerja dan SKI; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelola aset; 3. Mengembangkan pemanfaatan SISBADA di OPD; 4. Menganalisa dan memperbaiki SOP pengelolaan keuangan dan aset; 5. Menyiapkan instrumen ABK; 6. Meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur Pengelolaan keuangan; 7. Melakukan pendataan aset dan mengoptimalkan pemanfaatan aset; 8. Melakukan integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset. 9. Menyusun standar dan pedoman kerja penyusunan dan evaluasi anggaran 10. Menyusun identifikasi permasalahan hukum aset dan membuat rencana aksi. 11. Membuat prosedur rinci dan meningkatkan pengawasan terhadap proses jual belu aset daerah |
| **Tantangan (T)** | **Strategi (S-T)** | **Strategi (W-T)** |
| 1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan asset 2. Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi; 3. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat 4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah 5. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatya jumlah paket pengadaan barang dan jasa 6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance 7. Penerapan system akuntansi berbasis accrual 8. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK 9. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai 10. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa 11. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat | 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur; 2. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan BPKAD terkait; 3. Mengsosialisasikan penerapan E-goverment ke seluruh BPKAD; 4. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan; 5. Mengatur keterbukaan informasi kepada masyarakat; 6. Menyediakan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat; 7. Meningkatkan fasilitas pengelola barang dan bendahara; 8. Melakukan perencanaan pengadaan, menyusun SOP pengadaan, dan menetapkan waktu pelaksanaannya; 9. Melakukan sosialisasi akuntansi berbasis akrual; 10. Melakukan sosialisasi peraturan; | 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa; 3. Mnyusun dan melakukan evaluasi SOP; 4. Melakukan optimalisasi aset untuk menignkatkan pelayanan. |

Dari Isu dan permasalahan serta analisa diatas memerlukan penanganan secara komprehensif yang mencakup arah strategi organisasi, rencana program kerja dan rencana sumber pendanaan program. Beberapa langkah utama yang harus dilaksanakan oleh BPKAD untuk mengakomodir isu dan permasalahan diatas dalam melaksanakan pelayanan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

1. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
4. Melakukan kajian pemanfaatan aset – aset agar optimal dan mampu memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyrakat Jawa Barat;
5. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah terutama untuk menyusun data base dan memudahkan OPD dalam melakukan pelaporan;
6. Meningkatkan kordinasi dengan Pemerintah Pusat;
7. Menyusun SOP pengelolaan keuangan dan aset yang terintegrasi;
8. Meningkatkan kompetensi para personil Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.